



Kurangnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai Nilai Pancasila di dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara

Nazwa Azahra^{1*}, Imam Budi Santoso²

¹⁻²Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 2210631010206@student.unsika.ac.id

Abstract. *Pancasila as the ideology of the Indonesian nation must be a guideline for the life of the nation and state, the values contained in Pancasila must be understood, inspired, and practiced in everyday life. However, not all Indonesian people understand the values contained in Pancasila, so there are many deviations that occur in the application of Pancasila values. In the era of globalization, the times, and the development of science and technology (IPTEK) there are many deviations from the values of Pancasila. The purpose of this paper is to provide information that many Indonesian people do not understand the values of Pancasila, even practice the values contained in Pancasila, also invite readers to practice the values of Pancasila, because Pancasila is the ideology of the Indonesian nation that must be used as a way of life. . Pancasila as an ideology, namely in addition to its position as the basis of the Unitary State of the Republic of Indonesia, it is also a national ideology of Indonesia which is implemented consistently in the life of the state. The research conducted is based on looking at the facts that exist in the surrounding environment in the community.*

Keywords: *Civic and State Life; Globalization; National Ideology; Pancasila; Pancasila Values.*

Abstrak. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia harus menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dipahami, dijiwai, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua masyarakat Indonesia memahami nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Di era globalisasi, perkembangan zaman, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Tujuan dari penulisan ini untuk memberikan informasi bahwa banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami nilai-nilai Pancasila, bahkan mengamalkan nilai yang terkandung dalam Pancasila, juga mengajak kepada pembaca agar bisa mengamalkan nilai Pancasila, karena Pancasila adalah sebagai ideologi bangsa Indonesia yang harus dijadikan sebagai pedoman hidup. Pancasila sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Adapun penelitian yang dilakukan adalah berdasarkan melihat pada kenyataan-kenyataan yang ada terjadi di lingkungan sekitar di masyarakat.

Kata Kunci: Globalisasi; Ideologi Bangsa; Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara; Nilai Nilai Pancasila; Pancasila.

1. LATAR BELAKANG

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, selain kedudukannya sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Pancasila merupakan hasil galian dari nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia sendiri dan berwujud lima butir mutiara kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu religius monotheis, humanis, universal, nasionalis patriotis yang berkesatuan dalam keberagaman, demokrasi dalam musyawarah mufakat dan yang berkeadilan sosial. Pancasila sebagai dasar negara dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan

dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berdasarkan Pancasila.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dipahami, dijiwai, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman hidup. Perlunya setiap warga masyarakat untuk memahami dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sosialisasi bahwa Pancasila sebagai Ideologi atau dasar negara pun diperlukan agar setiap masyarakat mengetahui dan bisa memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Seluruh masyarakat Indonesia harus mengetahui dan memahami pentingnya Pancasila sebagai ideologi Bangsa, karena Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, dimana nilai-nilainya saling berkaitan satu sama lain.

Dengan demikian, Pancasila bukan imitasi dari ideologi negara lain, tetapi mencerminkan nilai amanat penderitaan rakyat dan kejayaan leluhur bangsa (Ujang Charda, 2018).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan metode penelitian survei yang mana ini merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menggunakan survei atau pengumpulan data melalui responden penelitian. Responden diberikan angket untuk mengisi jawaban atas pertanyaan yang sudah diajukan.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk fokus pada penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Juga penelitian ini dilakukan dengan memberikan beberapa rangkaian pertanyaan yang ditujukan kepada responden untuk dijawab.

Waktu dan Tempat Penelitian

Proses penyusunan artikel ini dilakukan dengan mengirimkan kuesioner melalui media sosial yang dilakukan pada tanggal 08 Oktober 2022, dengan media berupa link google form yang dibagikan melalui media sosial pribadi.

Target/Subjek Penelitian

Pada proses pembuatan artikel ini yang menjadi target atau sasaran dalam penelitian adalah siswa/siswi Sekolah Menengah Atas, kejuruan, atau sederajat (SMA, SMK, MAN). Dan, dilakukan penelitian juga kepada Mahasiswa dari berbagai Universitas berbeda.

Prosedur

Penelitian ini dimulai dengan peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang termuat dalam link google form, tentunya pertanyaan ini berdasarkan pada hal-hal yang pernah terjadi di kehidupan nyata. Setelah menyiapkan pertanyaan, lalu pertanyaan tersebut dibagikan kepada responden untuk dijawab. Setelah kuesioner tersebut dibagikan dan telah diisi, lalu dilakukan pengecekan terhadap jawaban yang telah diisi oleh responden.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penulisan artikel ini bersifat kualitatif dan kuantitatif dengan melihat pada hasil observasi yang sudah dilakukan menggunakan media online melalui link google formulir yang berisi kuesioner dan diisi oleh responden.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik kuesioner, dengan memberikan serangkaian pertanyaan untuk dijawab oleh responden, ataupun yang lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan artikel ini.

Teknik Analisis Data

Hal ini dilakukan dengan analisis wacana (discourse analysis) supaya tidak tumpang tindih dalam melakukan analisa. Setelah semua data terkumpul maka data tersebut di analisis untuk mendapatkan konklusi/kesimpulan, dimana teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Selain itu pun dilakukan juga analisis isi, dimana analisis isi yaitu dengan membandingkan antara jawaban satu dan jawaban lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Karena pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan sekularisme, seperti yang terjadi pada zaman Renaissance di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas.

Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya

hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara (Kaelan, 2000: 13).

Hans Nawiasky menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara disebut *staatsfundamentálnorm*, yang untuk Indonesia berupa Pancasila (Riyanto dalam Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2013: 93-94). Dalam Pandangan yang lain, pengembangan teori dasar negara dapat diambil dari pidato Mr. Soepomo. Dalam penjelasannya, kata “cita negara” merupakan terjemahan dari kata “*staatsidee*” yang terdapat dalam kepustakaan Jerman dan Belanda. Kata asing itu menjadi terkenal setelah beliau menyampaikan pidatonya dalam rapat pleno Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 31 Mei 1945. Sebagai catatan, Soepomo menerjemahkan “*Staatsidee*” dengan “dasar pengertian negara” atau “aliran pikiran negara”. Memang, dalam bahasa asing sendiri kata itu tidak mudah memperoleh uraian pengertiannya. J. Oppenheim (1849-1924), ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara di Groningen Belanda, mengemukakan dalam pidato pengukuhan yang kedua (1893) sebagai guru besar mengemukakan bahwa “*staatsidee*” dapat dilukiskan sebagai “hakikat yang paling dalam dari negara” (*de staats diapse wezen*), sebagai “kekuatan yang membentuk negara-negara (*de staten vermonde kracht*)” (Attamimi dalam Soeprapto, Bahar dan Arianto, 1995: 121).

Sebagai cita hukum (*rechtsidee*), baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum Dengan demikian, dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat (Yusuf, 2009).

Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila bahkan bisa berperan sebagai penjaga keseimbangan (*margin of appreciation*) antara dua ideology dunia yang bertentangan, karena dalam ideology Pancasila hak-hak individu dan masyarakat diakui secara proporsional. Rumusan tentang Pancasila tidak muncul dari sekedar pikiran logis-rasional, tetapi digali dari akar budaya akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Maka Bung Karno hanya mengaku diri sebagai penggali Pancasila, karena nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila itu diambil dari nilai-nilai yang sejak lama hadir dalam masyarakat Nusantara. Oleh karena itulah Pancasila disebut mengandung nilai-nilai dasar filsafat (*philosophische grondslag*),

merupakan jiwa bangsa (*volksgeist*) atau jati diri bangsa (*innerself of nation*), dan menjadi cara hidup (*way of life*) bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Dengan demikian nilai-nilai dalam Pancasila merupakan karakter bangsa, yang menjadikan bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Pendidikan Pancasila perlu karena dengan cara itulah karakter bangsa dapat lestari, terpelihara dari ancaman gelombang globalisasi yang semakin besar.

Pelestarian nilai-nilai Pancasila dilakukan khususnya lewat proses pendidikan formal, karena lewat pendidikan berbagai butir nilai Pancasila tersebut dapat disemaikan dan dikembangkan secara terencana dan terpadu. Semakin mudarnya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara membuat khawatir berbagai lapisan elemen masyarakat. Oleh sebab itu, sekitar tahun 2004 Azyumardi Azra menggagas perlunya rejuvenasi Pancasila sebagai faktor integratif dan salah satu fundamen identitas nasional. Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika bukanlah merupakan kategori yang sama. Ketidaksamaan itu berkaitan dengan realitas atau hakikat pengetahuannya, wujud pengetahuan, kebenaran pengetahuannya serta koherensi pengetahuannya. Selain keadaan diatas, juga terjadi terorisme yang mengatasnamakan agama. Rangkaian gejala tersebut seakan melengkapi kegelisahan publik selama reformasi yang mempertanyakan arah gerakan reformasi dan demokratisasi. Diskursus tentang Pancasila kembali menghangat dan meluas usai Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan FISIP-UI pada tanggal 31 Maret 2006 (Ali, 2009: 52). Sekretariat Wapres Republik Indonesia, pada tahun 2008/2009 secara intensif melakukan diskusi-diskusi untuk merevitalisasi sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Tahun 2009 Dirjen Dikti, juga membentuk Tim Pengkajian Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Sementara itu, beberapa perguruan tinggi telah menyelenggarakan kegiatan sejenis, yaitu antara lain: Kongres Pancasila di Universitas Gadjah Mada, Simposium Nasional Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Universitas Pendidikan Indonesia, dan Kongres Pancasila di Universitas Udayana. MPR-RI melakukan kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan sebutan “Empat Pilar Kebangsaan”, yang terdiri dari: Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Istilah “empat Pilar Kebangsaan” menurut Kaelan (2012: 249-252) mengandung arti: Linguisticmistake (kesalahan linguistik) atau dapat pula dikatakan kesalahan terminologi; ungkapan tersebut tidak mengacu pada realitas empiris sebagaimana terkandung dalam ungkapan bahasa, melainkan mengacu pada suatu pengertian atau ide, ‘berbangsa dan bernegara’ itu dianalogikan bangunan besar (gedung yang besar); kesalahan kategori (category mistake), karena secara epistemologis kategori pengetahuan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Soekarno (1960: 42) bahwa dalam mengadakan Negara Indonesia merdeka itu “harus dapat meletakkan negara itu atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa dan negara ini.” Selanjutnya Soekarno menegaskan dengan berkata, “saya beri uraian itu tadi agar saudara-saudara mengerti bahwa bagi Republik Indonesia, kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang bisa menjadi leitstar dinamis. Leitstar adalah istilah dari bahasa Jerman yang berarti ‘bintang pimpinan’. Lebih lanjut Soekarno mengatakan “Kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu leitstar dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalamdalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri...Kalau kita mau memasukkan elemen-elemen yang tidak ada di dalam jiwa Indonesia, tidak mungkin dijadikan dasar untuk duduk diatasnya”.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Sila-sila Pancasila merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat bulat dan utuh, hierarkis, dan sistematis. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kenyataan dan keadilan. Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing sila-silanya, karena apabila dilihat satu persatu dari masing-masing sila itu dapat saja ditemukan dalam kehidupan bangsa lain, namun makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tidak dapat ditukar balikkan letak dan susunannya.

Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Indonesia merupakan pandangan hidup (*weltanschauung*) bagi bangsa Indonesia. Sedangkan UUD 1945 merupakan landasan konstitusional. Sebagai suatu system ekonomi, Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan system ekonomi alternative lainnya yang berkembang di dunia saat ini. Sistem ekonomi berdasarkan Pancasila lebih memilih jalan sendiri dalam suatu system. Sistem masyarakat ekonomi menganut system ekonomi yang sesuai dengan filosofi yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.

Pancasila adalah sebagai dasar Negara Indonesia, Pancasila sebagai Ideologi bangsa, dimana nilai-nilai yang terkandung Pancasila saling berkaitan membentuk suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Nilai-nilai Pancasila perlu pahami dan diamalkan oleh seluruh masyarakat

Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tabel 1. Survei Hasil Pemahaman dan Penerapan Pancasila.

Pertanyaan	Hasil Jawaban
1. Pengamalan nilai-nilai Pancasila apa saja yang pernah teman-teman lakukan?	1. <i>Worshiping the almighty god</i> 2. <i>Doing social services and humanitarian activities</i> 3. <i>Doesn't discriminate between differences</i> 4. Toleransi terhadap teman yang berbeda agama 5. Gotong royong 6. Menaati peraturan yang berlaku
2. Contoh perilaku penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila?	1. Tidak adanya toleransi 2. Tawuran antar pelajar 3. Korupsi 4. Diskriminasi terhadap orang yang berbeda agama 5. Terorisme

Berdasarkan hasil survei penelitian terhadap para siswa dan mahasiswa didapatkan bahwa sekarang ini masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang masih terjadi. Tentunya dalam hal ini adalah penyimpangan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Beberapa alasan mengapa banyak masyarakat yang tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila berdasarkan hasil penelitian adalah bahwa nilai Pancasila masih dianggap rendah dikalangan masyarakat dan tidak dianggap penting, kurangnya pengetahuan dan wawasan terhadap Pancasila, masih banyak tindakan yang menyimpang seperti halnya pembunuhan, pelanggaran HAM, bullying, intoleransi, dan lainnya.

Sebagai warga negara Indonesia yang meyakini Pancasila sebagai dasar negara, yang menjunjung Pancasila sebagai pedoman hidup, yang memahami esensi nilai Pancasila, dan mengamalkan Pancasila merasa prihatin bahwa banyak sekali masyarakat lainnya yang belum memahami Pancasila dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya hal ini tidak dapat dibiarkan, dan perlu ada solusi terhadap permasalahan tersebut. Solusi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah: pertama, perlunya mengubah pola pikir (mindset) dari tiap-tiap individu agar dapat menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, tanamkan nilai Pancasila kepada anak-anak sejak dini, karena sebagai generasi penerus bangsa perlu melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pendiri negara, seperti halnya adalah Pancasila. Ketiga, menerapkan pendidikan bela negara atau pendidikan kewarganegaraan agar setiap individu memahami makna dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Keempat, sosialisasi secara masif kepada tiap-tiap individu baik melalui institusi pendidikan atau melalui media sosial, juga diperlukan sosialisasi dari pemerintah aparaturnya untuk memberikan informasi,

memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia.

Penerapan nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar dan mahasiswa yaitu biasanya dilakukan dengan toleransi terhadap teman yang berbeda agama, sebagaimana sesuai dengan Pancasila yang pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. diketahui pula bahwa Indonesia terdiri dari beraneka ragam, suku bangsa, agama, budaya, bahasa. Dimana dengan adanya perbedaan jangan sampai menimbulkan perpecahan atau konflik. Masyarakat Indonesia perlu menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda beda tetapi tetap satu jua. Perbedaan yang ada janganlah dijadikan sebagai perpecahan, namun dijadikan sebagai kekuatan untuk terus menjunjung persatuan. Penanaman satu nilai tentunya tidak cukup dan memang tidak bisa dalam konteks Pancasila, karena nilai-nilai Pancasila merupakan kesatuan organis yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dengan demikian, akan menjadi kekuatan moral besar manakala keseluruhan nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan dijadikan landasan moral dan diejawantahkan dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Penanaman nilai Pancasila paling efektif adalah melalui pendidikan dan media. Pendidikan Informal di keluarga harus menjadi landasan utama dan kemudian didukung oleh pendidikan formal di sekolah dan nonformal di masyarakat. Peran media juga sangat penting karena memiliki daya jangkauan dan daya pengaruh yang sangat kuat bagi masyarakat. Media harus memiliki visi dan misi mendidik bangsa dan membangun karakter masyarakat yang maju namun tetap berkepribadian Indonesia.

Nilai-nilai khusus yang termuat dalam Pancasila dapat ditemukan dalam sila-silanya (Andre Ata Ujan 1998), yaitu: Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, pada dasarnya memuat pengakuan eksplisit akan eksistensi Tuhan sebagai sumber dan pencipta universum. Pengakuan ini sekaligus memperlihatkan relasi esensial antara yang mencipta dan yang diciptakan serta menunjukkan ketergantungan yang diciptakan terhadap yang mencipta. Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, sesungguhnya merupakan refleksi lebih lanjut dari sila pertama, Sila ini memperlihatkan secara mendasar dari negara atas martabat manusia dan sekaligus komitmen untuk melindunginya. Asumsi dasar dibalik prinsip kedua ini ialah bahwa manusia, karena kedudukannya yang khusus di antara ciptaan-ciptaan lainnya di dalam universum, mempunyai hak dan kewajiban untuk mengembangkan kesempatan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dengan demikian, manusia secara natural, dengan akal dan budinya mempunyai kewajiban untuk mengembangkan dirinya menjadi person yang bernilai. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, secara khusus meminta perhatian setiap warga negara akan hak dan kewajiban dan tanggung jawabnya pada negara.

Khususnya dalam menjaga eksistensi negara dan bangsa. Sila keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, memperlihatkan pengakuan negara serta perlindungannya terhadap kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dalam iklim “musyawarah dan mufakat”. Dalam iklim keterbukaan untuk saling mendengarkan, mempertimbangkan satu sama lain dan juga sikap belajar serta saling menerima dan memberi. Hal ini berarti bahwa setiap orang diakui dan dilindungi haknya untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, secara istimewa menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap warga negara harus bisa menikmati keadilan secara nyata, tetapi iklim keadilan yang merata hanya bisa dicapai apabila struktur sosial masyarakat sendiri adil. Keadilan sosial terutama menuntut informasi struktur-struktur sosial, yaitu struktur ekonomi, politik, budaya dan ideologi ke arah yang lebih akomodatif terhadap kepentingan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila, sebagai penuntun (guiding principles) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah seharusnya diimplementasikan oleh seluruh warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila memberikan pedoman dan norma untuk membangun karakter warga negara, sehingga dapat menjadi warga negara yang baik (good citizenship). Pancasila memiliki nilai-nilai yang universal dan telah menjadi norma bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan melalui kuesioner, terdapat penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, salah satunya adalah perilaku korupsi. Situasi negara Indonesia saat ini begitu memprihatinkan, terdapat banyak masalah yang menimpa bangsa Indonesia dalam bentuk krisis yang multidimensional, seperti krisis ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, pendidikan dan lain-lain, yang sebenarnya berdaluh pada krisis moral. Moralitas memegang kunci yang sangat penting dalam mengatasi krisis. Bila krisis moral sebagai hulu dari setiap masalah, maka melalui moralitas pula krisis dapat diatasi. Indikator kemajuan bangsa tidak cukup diukur hanya dari kepandaian warganegaranya, tidak juga dari kekayaan alam yang dimiliki, namun hal yang lebih mendasar adalah sejauh mana bangsa tersebut memegang teguh moralitas. Moralitas memberi dasar, warna sekaligus penentu arah tindakan suatu bangsa. Moralitas saat ini menjadi sesuatu yang sangat mahal karena semakin langka orang yang memegang moralitas. Korupsi secara harfiah dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Tim Penulis Buku Pendidikan anti korupsi, 2011: 23). Korupsi adalah salah satu bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, maka dari itu perlunya membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila, yaitu membangun mentalitas melalui penguatan eksternal dan internal tersebut dalam diri masyarakat. Dalam perguruan

tinggi penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan kepribadian termasuk di dalamnya pendidikan Pancasila. Maka dari itu, perlunya diterapkan nilai-nilai anti korupsi, yaitu: pertama, Kejujuran, bagi seorang mahasiswa kejujuran sangat penting dan dapat dilakukan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, misalnya tidak mencontek, tidak melakukan plagiarisme dan tidak memalsukan nilai. Contoh kejujuran secara umum di masyarakat adalah dengan selalu berkata jujur. Kedua, Kepedulian, nilai kepedulian sebagai mahasiswa dapat diwujudkan dengan berusaha memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus serta memantau kondisi infrastruktur di kampus. Ketiga, Kemandirian, dianggap sebagai suatu hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Keempat, Kedisiplinan, kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai antikorupsi lainnya yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. Kedisiplinan dapat diwujudkan juga dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, patuh terhadap aturan yang berlaku. Kelima, Tanggung Jawab, penerapan nilai tanggung jawab dapat dilakukan dengan diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan predikat nilai yang baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan. Keenam, Kerja Keras, bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Ketujuh, Kesederhanaan, dengan gaya hidup sederhana manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Dengan gaya hidup yang sederhana, seseorang juga dibina untuk memprioritaskan kebutuhan diatas keinginannya. Kedelapan, Keberanian, dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Kesembilan, Keadilan, adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yaitu dengan bertindak proposisional dan tidak melanggar hukum. Keadilan berkaitan erat dengan hak, dalam konsepsi bangsa Indonesia hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Itulah nilai-nilai anti korupsi yang perlu diterapkan untuk seluruh lapisan masyarakat, hal tersebut guna meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Masyarakat perlu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya sekedar diketahui dan dipahami, namun perlu di amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di era globalisasi ini, perlunya dukungan serta kekuatan dari lapisan masyarakat Indonesia, untuk bersama-sama menjaga nilai-nilai Pancasila, bukan hanya dijaga namun perlunya penerapan dalam kehidupan sehari-

hari. Pancasila sebagai leitmotif yaitu dorongan hidup, artinya dalam menjalani kehidupan sehari-hari diperlukan berdasar pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Masyarakat hanya sekedar mengetahui apa itu Pancasila, tapi tidak dengan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 45 butir nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila harus betul-betul dipahami, dimaknai, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman Pancasila perlu diterapkan kepada anak-anak sejak usia dini, melalui pembelajaran di sekolah seperti halnya dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila. Penelitian yang dilakukan melalui kuesioner, diisi oleh responden yang merupakan pelajar dan mahasiswa. Mereka mengamati di lingkungan sekolah dan lingkungan universitas, bahwa baik pelajar atau mahasiswa itu sendiri banyak sekali yang masih mengabaikan pentingnya nilai-nilai Pancasila, padahal nilai tersebut menjadi landasan dalam menjalani kehidupan. Sikap masyarakat yang sangat acuh terhadap Pancasila menimbulkan banyak penyimpangan yang terjadi, jangan sampai nilai-nilai Pancasila dilupakan oleh masyarakat dan generasi selanjutnya. Pancasila adalah nilai-nilai luhur, yang perlu dijaga, dilestarikan, dijadikan sebagai dasar dalam berkehidupan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah menjadi kesatuan yang bulat dan utuh, yang saling berkaitan satu sama lain membentuk suatu sistem. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain Pancasila sebagai intellectual bastion (Sofian Effendi); Pancasila sebagai common denominator values (Muladi); Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pancasila adalah dasar negara Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila terdiri dari lima sila yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila adalah leitmotif dan leitstar, yaitu dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan. Tanpa adanya

leitmotive dan leitstar Pancasila ini, kekuasaan negara akan menyeleweng. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Pancasila juga dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan diyakini kebenarannya.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa banyak masyarakat yang masih melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Penyimpangan yang dilakukan yaitu, tidak adanya toleransi, tawuran antar pelajar, diskriminasi, dan korupsi. Hal tersebut bisa terjadi, karena banyak masyarakat yang masih belum mengetahui esensi dari Pancasila itu sendiri, belum mengetahui mengenai makna yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila mengandung 45 butir nilai yang perlu dipahami dan diamalkan oleh masyarakat Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar untuk diketahui keberadaannya, namun perlu diketahui pula kedudukannya, dan perlu dianggap penting dan dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila sudah menjadi kesatuan yang bulat dan utuh, kelima sila tersebut saling berkaitan dan menjiwai satu sama lain. Pancasila juga sebagai perjanjian luhur, artinya yaitu sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa yang disepakati oleh para pendiri negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia.

Saran

Setiap masyarakat Indonesia perlu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlunya setiap individu memahami esensi nilai Pancasila, dan mengamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya sekedar diketahui, namun perlu dipahami dan diamalkan. Penanaman Pancasila perlu dilakukan pada anak-anak sejak usia dini, penanaman nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk setiap individu, karena nilai-nilai yang terkandung sudah dijamin kebenarannya. Kelima sila Pancasila saling berkaitan dan menjiwai satu sama lain, sehingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, A. (2009). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*. Kencana Prenada Media Group.
- Attamimi, A. H. S. (1995). Peranan keputusan presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. In M. Bahar & K. Arianto (Eds.), *Risalah sidang BPUPKI dan PPKI*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Charda, U. (2018). *Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan*. Fokusmedia.
- Kaelan. (2000). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.
- Kaelan. (2012). *Problematisa empat pilar berbangsa dan bernegara*. Paradigma.
- Muladi. (2006). *Hak asasi manusia: Hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*. Refika Aditama.
- Nurwardani, P., Saksama, H. Y., Kuswanjono, A., Munir, M., Muntasyir, R., Nurdin, E. S., Mulyono, E., Prawatyani, S. J., Anwar, A. A., Evawany, Priyautama, F., & Festanto, A. (2016). *Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi*. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009–2014. (2013). *Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara*. Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Soekarno. (1960). *Lahirnya Pancasila*. Panitia Penerbitan di Bawah Bendera Revolusi.
- Effendi, S. (2005). *Membangun martabat manusia: Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan bangsa*. Gadjah Mada University Press.
- Soeprapto, B., Bahar, M., & Arianto, N. (1995). *Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Syarbaini, S. (2021). *Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi*. Edu Pustaka.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. (2011). *Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Ujan, A. A. (1998). *Keadilan dan demokrasi: Telaah filsafat politik John Rawls*. Kanisius.
- Yusuf, M. (2009). *Negara hukum dan demokrasi Indonesia*. Remaja Rosdakarya.